

Refleksi Demonstrasi Suara Ibu Peduli: Perjuangan Aktivistis Perempuan Menggulirkan Reformasi dan Melawan Orde Baru

Reflections on the Protest of the Voice of Concerned Mothers: The Struggle of Women Activists to Achieve Reformasi and Resist the New Order

Gadis Arivia¹, Karlina Supelli², & Wilasih Nophiana Kunta Adjie³

¹Montgomery College, Takoma Silver Spring, Maryland, USA

²STF Driyarkara, Jakarta Pusat, Indonesia

³Yayasan Proyek Peduli, Gianyar, Indonesia

gadis.effendi@montgomerycollege.edu

Kronologi Naskah: diterima 25 Juni 2025, direvisi 21 September 2025, diputuskan diterima 28 September 2025

Abstract

The demonstration by the Voice of Concerned Mothers (SIP) on February 23, 1998, is often reduced in the public narrative to a spontaneous action by “housewives” demanding affordable milk prices. However, these narratives obscure the political complexity, strategy, and courage of the feminist activists who initiated the action amid the repression of the New Order. The history of the SIP demonstrations is not just a story about rising milk prices, but an organized effort to “break the silence,” create space for political intervention in the context of the economic crisis, and reject the authoritarian Soeharto regime. The authors agree that the SIP action of February 23, 1998, was the first openly feminist political action to be carried out to overthrow Soeharto. The strategy of using the symbol “mother” and the “milk” issue is not a coincidence, but rather a clever camouflage to protect the movement from subversive accusations and to build a bridge of empathy with society. This paper traces the history through a collaborative autoethnographic approach, utilizing the personal experiences and narratives of the SIP demonstrators who were arrested as the primary data. This study examines the layers of strategy, emotion, and dynamics that shape the collective meaning of the SIP movement.

Keywords: Demonstration of the Voice of Concerned Mothers, Feminist Activism, Collaborative Autoethnography, Milk Politics, New Order

Abstrak

Demonstrasi Suara Ibu Peduli (SIP) pada 23 Februari 1998 kerap direduksi dalam narasi publik sebagai aksi spontan “ibu-ibu rumah tangga” menuntut harga susu murah. Namun, narasi ini menutupi kompleksitas politik, strategi, dan keberanian dari para aktivis feminis yang menggagas aksi tersebut di tengah represi Orde Baru. Sejarah demonstrasi SIP bukan sekadar cerita soal kenaikan harga susu, melainkan upaya terorganisir untuk “breaking the silence,” menciptakan ruang intervensi politik dalam konteks krisis ekonomi dan menolak rezim Soeharto yang otoriter. Para penulis sepakat bahwa aksi SIP 23 Februari 1998 merupakan aksi politik feminis pertama yang dilakukan secara terbuka untuk menjatuhkan Soeharto. Strategi penggunaan simbol “ibu” dan “susu” bukanlah kebetulan, melainkan kamufase cerdas untuk melindungi gerakan dari tuduhan subversif dan untuk membangun jembatan empati dengan masyarakat. Tulisan ini menelusuri kembali sejarah tersebut melalui pendekatan autoetnografi kolaboratif dengan menggunakan pengalaman dan narasi personal para pelaku demonstrasi SIP yang ditangkap sebagai data utama. Kajian ini menggali lapisan-lapisan strategi, emosi, serta dinamika representasi yang membentuk makna kolektif gerakan SIP.

Kata kunci: Demonstrasi Suara Ibu Peduli, Aktivistis Feminis, autoetnografi kolaboratif, Politik Susu, Orde Baru

Pendahuluan

Tulisan ini berangkat dari kesadaran bahwa sejarah gerakan perempuan kerap disisihkan dari narasi besar politik nasional. Eksplorasi dan refleksi aksi Suara Ibu Peduli 23 Februari 1998, penting untuk didalami karena demonstrasi ini adalah bagian dari sejarah penegakan Reformasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa sejarah Reformasi berkaitan dengan sejarah politik perempuan, representasi aktivis perempuan, dan strategi feminis dalam melawan pemerintahan otoriter.

Ada lima alasan mengapa demonstrasi ini penting untuk dicatat dalam sejarah politik di Indonesia. Pertama, SIP adalah demonstrasi publik pertama yang diorganisir oleh aktivis perempuan di kantor *Jurnal Perempuan*. Lokasi pengorganisasian demonstrasi penting untuk digarisbawahi karena kantor ini bergiat di bidang feminisme dan beralamat di Megaria, Jakarta Pusat. Kedua, aksi ini menarik perhatian masyarakat luas, melibatkan warga sipil, khususnya aktivis perempuan, saat sebagian besar masyarakat dan mahasiswa masih

takut bergerak karena represi dan penculikan para aktivis yang dilakukan negara. Dalam kondisi tersebut, aksi SIP menjadi sinyal awal perlawanan sipil yang terbuka dan strategis, yang kemudian menginspirasi gerakan lebih besar. Ketiga, aksi ini merupakan aksi feminis yang dipublikasikan media secara luas oleh media nasional maupun internasional seperti *Associated Press*. Demonstrasi ini dirancang dengan berlapis-lapis dan menggunakan strategi kamufase. Misalnya, menggunakan simbol “ibu-ibu” dan isu harga susu sebagai taktik menghindari sasaran negara. Pendekatan semiotik menawarkan pesan tersembunyi, misalnya “turunkan harga susu” yang dapat dibaca sebagai “turunkan Su-Su-(harto).” Ini menunjukkan bahwa perempuan hadir sebagai aktor politik yang cerdas dan strategis. Keempat, aksi ini menunjukkan kritik dan rekonstruksi politik representasi gender. Para penulis sadar bahwa penggunaan kata “ibu” menantang logika negara Orde Baru yang selalu menggiring perempuan hanya sebagai penjaga domestik (Dharma Wanita, PKK, dan sebagainya). Dengan menggunakan identitas “ibu” secara sadar dan strategis, para aktivis mempermainkan logika tersebut. Disatusisi, merujuk pada ideologi *ibuisme* Orde Baru, tetapi di sisi lain, memanfaatkan stereotip gender untuk merebut ruang politik serta sekaligus mengganggu logika tersebut dan menggiringnya ke arah politik representasi yang subversif. Kelima, demonstrasi ini adalah titik temu antara strategi politik feminis dan performativitas simbolik. Seperti dijelaskan oleh Gadis Arivia, penyebutan “ibu” dan “susu” adalah konstruksi politik yang disengaja untuk menghindari represi negara, sekaligus mengartikulasikan tuntutan demokrasi melalui idiom yang dapat diterima oleh publik. Strategi ini menunjukkan bagaimana para aktivis feminis menggunakan politik representasi feminis sebagai taktik sekaligus kritik terhadap rezim otoriter yang represif (Arivia 2018).

Untuk menganalisis demonstrasi SIP 23 Februari 1998, kami para penulis menggunakan pendekatan autoetnografi kolaboratif, sebagai metodologi yang memungkinkan penelitian ini menjembatani pengalaman personal dan analisis kultural, memberikan ruang untuk merekonstruksi peristiwa politik dari sudut pandang subyektif pelaku, dalam hal ini demonstran yang ditangkap. Lebih jauh, kami ingin membongkar struktur makna dominan yang memarginalisasi pengalaman perempuan. Melalui refleksi naratif para penulis, tulisan ini menelusuri bagaimana tubuh perempuan, peran manipulasi keibuan, dan ekspresi emosional menjadi sarana sekaligus arena perjuangan yang digunakan secara taktis. Tulisan ini tidak sekedar

merekam sejarah, tetapi juga menawarkan pembacaan ulang atas relasi antara negara, perempuan, dan narasi publik. Kami ingin membangun dan menguatkan kembali arsip feminis yang selama ini direduksi peranannya atau dihapus. Dengan memadukan metode autoetnografi dan perspektif feminis, tulisan ini berupaya memperlihatkan bahwa demonstrasi SIP adalah tindakan politik yang strategis, reflektif, dan penuh risiko, sebuah bentuk aktivisme perempuan yang melampaui romantisasi domestik dan mengukuhkan posisi perempuan sebagai subyek perubahan sosial.

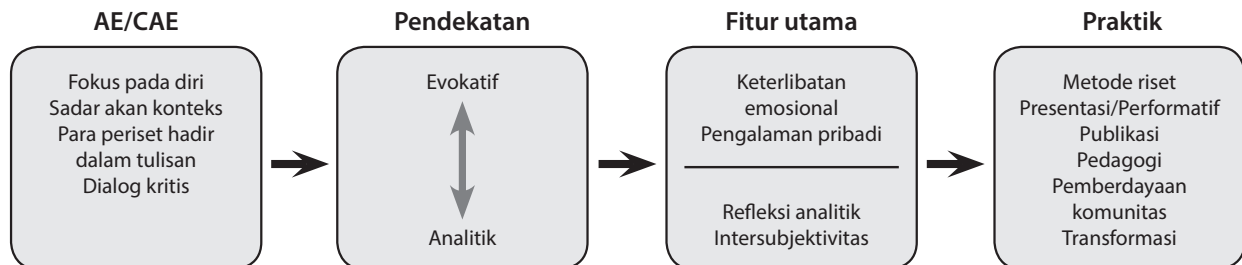
Metode Penelitian

Kami memilih metode autoetnografi kolaboratif sebagai upaya menghidupkan arsip tubuh dan ingatan kolektif demonstrasi SIP pada 23 Februari 1998. Pendekatan autoetnografi kolaboratif adalah metode kualitatif yang menggabungkan narasi-narasi pribadi dengan analisis kultural untuk mengungkap bagaimana pengalaman subyektif terjalin erat dengan struktur sosial-politik yang lebih luas. Sebelum adanya pendekatan autoetnografi kolaboratif, dunia akademisi mengenal terlebih dahulu autoetnografi sebagai pendekatan metodologis yang lahir dari pertemuan antara penulisan diri (autobiografi) dan etnografi, yang memungkinkan peneliti untuk menyusun narasi pribadi sebagai bahan refleksi kultural dan politis. Sebagaimana dijelaskan oleh Chang (2008), autoetnografi bukan sekadar penceritaan pengalaman pribadi, tetapi sebuah proyek analitik dan interpretatif yang menjembatani pengalaman subyektif dengan struktur sosial dan makna kolektif dalam suatu masyarakat. Carolyn Ellis dan Arthur Bochner (2000, 2016) menekankan bahwa autoetnografi berlandaskan emosi, reflektif, dan politis, serta mampu mengeksplorasi wilayah-wilayah rapuh dalam kehidupan pribadi, termasuk trauma, keberanian, atau keberpihakan, sebagai sumber pengetahuan.

Autoetnografi kolaboratif (CAE), yang dikembangkan oleh Chang, Ngunjiri, dan Hernandez (2013) adalah pendekatan kualitatif yang menggabungkan refleksi naratif personal dengan analisis kolektif. Para peneliti yang juga merupakan pelaku sejarah atau bagian dari komunitas yang dikaji, menulis, berbagi, dan menganalisis pengalaman mereka secara bersama-sama. Perbedaan autoetnografi (AE) dan CAE hanya berada di dalam pengerjaan refleksinya. Misalnya, AE melakukan interogasi-diri tetapi tidak secara kolaboratif dan kooperatif secara berkelompok sesama peneliti. Chang menyebutkan di dalam bukunya bahwa metode ini telah digunakan oleh berbagai peneliti, seperti

penelitian duoethnography oleh Norris, Sawyer, & Lund (2011); Sawyer & Norris (2004 & 2009), penelitian co-etnografi oleh Ellis & Bochner (1992), CAE oleh Kalmbach Phillips et al. (2009), dan sebagainya. CAE

adalah aplikasi pragmatis yang digunakan untuk mempertanyakan fenomena sosial yang terjadi. Berikut adalah bagan penjelasan secara umum sebagaimana ditulis oleh Chang dan kawan-kawan.



Gambar 1. Bagan Pemahaman AE dan CAE

Sumber: Bagan diambil dari Chang et al. (2013)

Sebagaimana dijelaskan oleh Chang et al. (2013), baik AE maupun CAE menggarisbawahi upaya untuk fokus pada diri sendiri. Artinya, pengalaman periset dan pendapatnya berada dalam investigasi dan periset secara bersamaan sebagai instrumen dan sumber data. Refleksi kritis juga dibutuhkan agar pendapat pribadi dapat diperiksa secara bersama. Proses berpikir bersama ini dilakukan secara transparan dan terbuka kepada pembaca. Periset juga sadar akan konteks dan bahkan ikut mengalaminya. Oleh sebab itu, periset hadir dalam tulisan. Kehadirannya dapat dirasakan dalam hal aspek kultural dan sosial, menghubungkannya dengan kehidupan pribadinya, dan kadang memosisikan diri sebagai yang rentan (*vulnerable*). Menyandingkan “diri” dan “konteks sosial” merupakan hal yang penting dalam pekerjaan autoetnografi maupun autoetnografi kolaboratif. Ciri lain yang penting dari AE dan CAE adalah dialog kritis. AE dan CAE memungkinkan periset untuk menjadi instrumen aktif dan dapat merangkai dan mengonstruksi makna (Chang mengutip Anderson 2006; Lapadat 2009). Posisi periset di sini menjadi menarik karena berada sekaligus di posisi periset dan partisipan. Oleh sebab itu, sangat kaya akan dialog internal. Dialog ini terutama di dalam CAE melahirkan makna pemikiran yang mendalam serta memberikan ruang yang luas untuk melakukan interpretasi bersama.

Beberapa landasan teoretis yang dapat digunakan untuk memperkuat metodologi ini antara lain adalah pemikiran Linda Hutcheon (1989), yang mengembangkan teori politik representasi. Ia melihat representasi bukan sebagai cermin realitas, melainkan sebagai proses diskursif yang mengonstruksi makna

dan kekuasaan. Dalam aksi SIP, permainan simbol, seperti “ibu-ibu”, “susu”, dan “anak-anak” bukanlah bentuk kepolosan ranah domestik, tetapi taktik diskursif yang membongkar narasi hegemonik negara Orde Baru, sekaligus merebut kembali ruang publik bagi perempuan sebagai subyek politik. Hutcheon dalam *The Politics of Postmodernism* menyatakan bahwa representasi tidak pernah netral, tetapi selalu merupakan tindakan politik: “Representasi tidak mencerminkan realitas secara langsung, melainkan membentuk cara kita memahami dan merasakan realitas tersebut” (Hutcheon 1989, hlm. 3). Representasi adalah medan pertarungan makna, tempat ideologi dominan dikukuhkan sekaligus dapat digugat.

Pernyataan Hutcheon seirama dengan pemikiran Trinh T. Minh-ha (1991) yang mengkritik feminisme Barat, khususnya kecenderungannya menjadikan perempuan dunia Ketiga sebagai *objek* dalam narasi representasi, sehingga menutupi kompleksitas pengalaman dan konteks yang mereka miliki. Analisis Trinh dapat digunakan di sini dalam melihat bagaimana kasus SIP ditulis oleh feminis Barat dan juga media arus utama yang meliputi ketika itu. Aktivis perempuan SIP yang berdemonstrasi direduksi sebagai “ibu yang baik” yang miris akan harga kenaikan susu atau aksi yang dilabelkan ibu-ibu kelas menengah (Blackburn 2004, hlm. 163—164). Aksi SIP tidak dilihat sebagai aksi feminis dan kecerdasan aktivis perempuan yang berstrategi dihapus dalam jejak narasi besar. Masyarakat pun digiring untuk melihat “aksi” SIP sebagai aksi spontan “ibu-ibu” agar dapat diredam sebatas hanya keprihatinan seorang ibu. Pencerabutan dari aktivisme feminis yang berstrategi

serta penuh dengan keberanian diredam sebagai aksi yang tidak berdampak pada wacana kebebasan, demokrasi, dan hak-hak perempuan.

Autoetnografi kolaboratif di dalam tulisan ini merekonstruksi sejarah demonstrasi SIP, tidak hanya sebagai peristiwa “ibu-ibu” tetapi sebagai peristiwa politik, pengalaman tubuh, emosi, dan ingatan perempuan yang selama ini terpinggirkan dalam narasi arus utama reformasi. Kami sebagai pelaku maupun saksi langsung memosisikan diri sebagai subyek sekaligus narator dalam tulisan ini. Posisi tersebut memungkinkan penyusunan narasi dari dalam, dengan basis pengalaman hidup dan keterlibatan dalam gerakan perempuan yang menginisiasi aksi SIP. Dengan demikian, metode ini tidak hanya bersifat deskriptif, melainkan kritis dan reflektif, menelusuri ulang jejak-jejak perlawanan yang disampaikan melalui tubuh, simbol, dan taktik politis. Tulisan ini dengan metode dan landasan teorinya tidak hanya mengungkap sejarah yang disenyapkan, tetapi juga menantang cara kami, sebagai feminis, sebagai warga negara, sebagai penulis, mengakses, menarasikan, dan memahami kembali sejarah perempuan dan sejarah politik Indonesia.

Data dalam tulisan ini dikumpulkan melalui:

1. Refleksi dan diskusi tiga tokoh SIP yang ditangkap, Karlina Supelli, Gadis Arivia, dan Wilasih Nophiana Kunta Adjie yang dilakukan pada 9 Juni 2025 melalui platform daring dan dilanjutkan dengan WhatsApp serta percakapan telepon.
2. Refleksi tertulis Wilasih Nophiana Kunta Adjie (24 Juni 2025), yang memperkaya dimensi pengalaman pribadi, keluarga, dan keberanian sebagai aktivis perempuan etnis Cina¹.
3. Dokumen historis dan tulisan terdahulu, terutama esai “Politik Representasi Suara Ibu Peduli” karya Gadis Arivia (2018) yang membongkar strategi simbolik aksi dan feminisme praksis.
4. Pledoi ketiga demonstran yang ditangkap dan dibacakan di depan hakim: Gadis Arivia “Hak untuk Menyatakan Pendapat: Sebuah Pembelaan”, Karlina Supelli “Untuk Masa Depan yang Lebih Baik”, dan Wilasih Nophiana “Saya Seorang Ibu.”
5. Buku disunting oleh Nur Iman Subono berjudul, *Catatan Perjalanan Suara Ibu Peduli* (YJP Press 1999), merupakan buku pertama tentang SIP ditulis oleh para aktivis perempuan yang terlibat dalam demonstrasi SIP, 23 Februari 1998.

6. Ingatan personal, artefak aktivisme, serta suasana emosional yang terekam selama peristiwa dan setelahnya, menjadi bagian penting dari proses penulisan yang menghidupkan kembali “arsip tubuh perempuan”.

Dalam proses analisis, kami melakukan pembacaan tematik dan naratif atas diskusi pengalaman dan dokumen yang terkumpul, seraya menerapkan prinsip-prinsip etika feminis, yaitu merawat emosi dan trauma masa lalu, mempertimbangkan dampak narasi terhadap relasi personal, serta menjaga sensitivitas terhadap orang-orang yang disebutkan. Refleksi dilakukan secara terus-menerus, baik terhadap peristiwa itu sendiri maupun terhadap cara penulis memilih untuk mengisahkannya. Elaborasi pembahasan dituturkan oleh ketiga penulis dengan merefleksikan pengalaman masing-masing dan bagaimana mereka menginterpretasikan demonstrasi SIP 23 Februari 1998.

Perlu diungkapkan pula meskipun pendekatan autoetnografi feminis dan kolaboratif etnografi memberikan ruang penting bagi pengalaman personal dan kolektif sebagai sumber pengetahuan, keduanya memiliki sejumlah keterbatasan. Autoetnografi kerap dikritik karena sifatnya yang subjektif dan risiko bias, mengingat penulis berperan sekaligus sebagai peneliti, partisipan, dan pencerita sehingga validitas temuan perlu diperkuat melalui arsip, wawancara, atau data pendukung lainnya (Ellis & Bochner 2000). Di sisi lain, kolaboratif etnografi menghadirkan tantangan tersendiri karena melibatkan negosiasi yang kompleks antarpeleliti dan partisipan serta perbedaan pengalaman aktivis (Lassiter 2005). Dengan demikian, meskipun pendekatan AE dan CAE efektif dalam menggali perspektif feminis dan menyoroti pengalaman yang disenyapkan, keterbatasan ini perlu disadari untuk memastikan penelitian tetap reflektif, etis, dan kontekstual.

Motivasi, Konteks, dan Latar Belakang Demontran

Motivasi, konteks, dan latar belakang demonstran SIP yang ditangkap pada 23 Februari 1998, perlu diungkap untuk memahami siapa mereka. Ketiga demonstran yang ditangkap sudah terlibat dalam aktivisme hak-hak perempuan dan Hak Asasi Manusia sebelum memutuskan melakukan aksi demonstrasi. Dua demonstran bekerja di Yayasan Jurnal Perempuan, Gadis Arivia sebagai direktur YJP dan Karlina Supelli sebagai anggota redaksi *Jurnal Perempuan*. Kegiatan

inti YJP adalah melakukan advokasi, penelitian, dan penerbitan *Jurnal Perempuan*. Wilasih adalah satu-satunya yang bukan bagian dari organisasi YJP dan awalnya kami tidak saling mengenal. Wilasih ikut ditangkap dan sengaja ikut naik ke dalam truk bersama Karlina dan Gadis ketika diangkut ke Polda Metro Jaya. Sosok Wilasih adalah sosok seorang aktivis yang telah lama ikut dalam kegiatan politik di Salatiga. Berikut Wilasih menuturkan:

“Sebelum kembali ke Jakarta, saya berkuliah di Salatiga, di mana pada saat itu, saya berkegiatan di Yayasan Geni yang aktivitasnya adalah kelompok diskusi, untuk berbagai isu politik, membahas teori-teori sosial. Beruntungnya di kota Salatiga pada saat itu ada narasumber, seperti Arief Budiman, Ariel Heryanto, George Yunus Aditjondro. Banyak sekali mahasiswa dari kota lain yang datang untuk berdiskusi dan membawa kabar tentang situasi ketimpangan, yang terjadi karena kesewenang-wenangan penguasa yang sangat represif. Pada masa itu, kami menyebut setiap kota punya kantong demokrasi. Kami (mahasiswa antar kota) merespons banyak situasi sosial politik, seperti kasus Marsinah, Kedung Ombo, Yogya berdarah, berdemo untuk kasus-kasus teman-teman yang ditangkap karena demo Golongan Putih, Tanah untuk Rakyat, banyak sekali rasanya demo yang kami hadapi. Namun, kalau menengok agak ke awal, yang menggerakkan saya pertama kali untuk peduli atas isu-isu sosial politik adalah gerakan untuk melawan pemerintah daerah kota Salatiga yang melarang pedagang kaki lima untuk berjualan demi memenangkan predikat kota Adipura. Saya merasa harus bergerak karena ada situasi yang sangat manusiawi di depan mata saya. Ketimpangan sosial yang membuat rakyat miskin tidak berdaya mempertahankan kebutuhan dasar keluarganya untuk makan dan sekolah anak-anaknya dimatikan” (Wilasih Nophiana Kunta Adjie 2025, Testimoni Tertulis 24 Juni).

Pada masa menjelang demonstrasi SIP 23 Februari 1998, Karlina Supelli baru saja menyelesaikan ujian disertasinya pada akhir tahun 1997. Ia diperkenalkan kepada Gadis Arivia oleh Prof. Toeti Heraty di jurusan Filsafat, Universitas Indonesia, dan sejak itu aktif terlibat dalam diskusi-diskusi feminis dan politik di kantor *Jurnal Perempuan*. Karlina resmi bergabung sebagai editor *Jurnal Perempuan* pada Agustus 1997.

“Saya ingat Ibu Toeti memperkenalkan, ‘ini Gadis staf yang baru pulang dari Prancis baru selesai S2’. Kemudian kita mulai sapaan, ngobrol, terus Gadis ajak saya ikut *Jurnal Perempuan*. Waktu itu saya masih disertasi S3. Saya masih baru belajar filsafat tapi disuruh mengajar, ampun deh bu Toeti” (Karlina Supelli 2025, Diskusi Bersama 9 Juni).

Pelurusan Sejarah Gerakan “Suara Ibu Peduli”

Gerakan Suara Ibu Peduli (SIP) lahir dalam konteks sosial-politik yang sangat genting di penghujung kekuasaan Orde Baru di tengah krisis ekonomi,

melonjaknya harga kebutuhan pokok, dan stagnasi gerakan mahasiswa akibat penindasan yang dilakukan oleh negara. Karlina menjelaskan tentang kegentingan situasi saat itu.

“Di dalam diskusi kecil di *Jurnal Perempuan* kan kita itu merasa bahwa situasi sosial politik itu sudah sangat tegang. Barang-barang rumah tangga ya kebutuhan rumah tangga kan harga-harga naik karena krisis ekonomi, mulai di akhir ‘97 awal ‘98, harga-harga naik lalu kita dengar cerita bahwa orang mulai menjarah. Orang sudah antri dan sulit dapat makan sehari-hari seperti tempe dan tahu, semua harganya naik. Jadi orang mulai kesulitan dan kita menangkap situasi ekonomi sosial politik yang lalu kita berkesimpulan waktu itu, ini kan bukan hanya soal krisis ekonomi, tetapi ini soal politik yang *gak* becus, *gak* benar” (Karlina Supelli 2025, Diskusi Bersama 9 Juni).

Kutipan ini menunjukkan bahwa kami membaca krisis ekonomi sebagai gejala dari kegagalan politik yang lebih dalam dan karena itu, kami merasa perlu bertindak. Aksi SIP bukan hanya tanggapan terhadap kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, tetapi strategi sadar yang dibangun atas keprihatinan terhadap situasi struktural negara yang represif dan korup. Hal inilah yang tidak ditangkap oleh media massa dan juga akademisi yang meneliti tentang SIP. Sebagian besar penelitian tentang SIP berangkat dari anggapan bahwa aksi ini semata kegelisahan “ibu-ibu kelas menengah” yang prihatin akan harga kenaikan susu atau kebutuhan pokok. Pemberitaan luas di media masa tentang SIP saat itu juga memasukkan aktivis perempuan SIP dalam kungkungan “ibu-ibu kelas menengah”. Ada kenggan publik untuk melihat demonstrasi SIP sebagai demonstrasi aktivis perempuan yang bersuara kritis menentang rezim Soeharto.

Gadis menerangkan bahwa demonstrasi SIP murni direncanakan oleh para aktivis perempuan. Karlina juga mengungkapkan hal yang sama dan merasa bahwa demonstrasi SIP adalah demonstrasi yang menggulirkan Reformasi.

“Demonstrasi ini direncanakan oleh para aktivis perempuan di kantor *Jurnal Perempuan*... Bukan demonstrasi ‘ibu-ibu’ yang spontan. Kami ini para aktivis feminis... sasaran demonstrasinya bukan semata soal harga susu tetapi menjatuhkan Soeharto. Sebenarnya kita ingin menjatuhkan Soeharto karena melihat mahasiswa sulit bergerak dan masyarakat belum bergerak sehingga waktu itu kita punya istilah *harus “breaking the silence”*” (Gadis Arivia 2025, Diskusi Bersama 9 Juni).

“Kita merasa bahwa situasi sosial politik itu sudah sangat tegang...harga-harga naik karena krisis ekonomi...Lalu kita berkesimpulan: ini bukan hanya soal krisis ekonomi, tetapi ini soal politik yang *gak* becus, *gak* benar. Saya sadar

bahwa demonstrasi Suara Ibu Peduli 23 Februari 1998 adalah strategi politik perempuan yang menggulirkan Reformasi pertama kali. Ini saya sadari ketika baru-baru ini saya diminta bicara oleh Tempo (Karlina Supelli 2025, Diskusi Bersama 9 Juni).

Baik Gadis maupun Karlina merasa perlu meluruskan pemahaman demonstrasi SIP 23 Februari 1998 yang salah kaprah. Tulisan-tulisan yang beredar baik di kalangan media maupun di akademisi mengungkapkan bahwa demonstrasi SIP 23 Februari 1998 adalah gerakan “ibu-ibu” yang spontan dan yang prihatin akan keadaan kebutuhan pokok semata. Padahal rencana demonstrasi telah direncanakan dan dibicarakan di bulan Agustus 1997 di rumah Gadis bersama Karlina dan Eunsook (mahasiswa asing yang sedang magang di *Jurnal Perempuan*) serta di kantor Yayasan Jurnal Perempuan dengan staf internal. Karlina mengingat kembali awal pembicaraan di rumah Gadis.

Saya masih ingat kita duduk di lantai bertiga. Itu saya ingat sekali... Kita *kan udah* sering ngobrol kalau pas lagi di JP nih, kok begini gitu ya, udah sebel aja kan. Nama Soeharto waktu itu rasanya udah *nggak* pantas... Jadi situasinya tegang. Lalu Eunsook komentar: kalau anak-anaknya belum bergerak, kenapa *nggak* ibunya? Itu Eunsook yang ngomong, ya... terus saya ingat Gadis bilang, kalau *gitu* kita segera *aja* bergerak, kita undang teman-teman aktivis perempuan (Karlina Supelli 2025, Diskusi Bersama 9 Juni).

Menjelang Aksi, Strategi, Perencanaan, dan Taktik

Persiapan aksi SIP 23 Februari 1998 dimulai jauh sebelum tanggal demonstrasi dan merupakan hasil dari serangkaian diskusi kritis, pertimbangan strategis, serta keberanian kolektif para aktivis perempuan. Dalam konteks represi Orde Baru, para penggagas SIP menyadari bahwa mereka tidak mungkin turun ke jalan secara terbuka menyuarakan tuntutan politis seperti “Turunkan Soeharto” tanpa menghadapi risiko serius. Karena itu, strategi utama mereka adalah kamufase simbolik narasi keibuan, yang dikembangkan secara intensif melalui serangkaian rapat dan perencanaan kolektif. Gadis Arivia (2018) di dalam artikelnya menulis bahwa:

“Kami sadar kami tidak bisa merencanakan membawa spanduk ‘Turunkan Soeharto’, maka perlu memikirkan *concern* apa yang dapat menarik simpati publik... Sambil merapatkan tema-tema edisi Jurnal Perempuan dan mengedit artikel-artikel JP, sambil pula dibicarakan terus-menerus kemungkinan suksesnya memakai ide susu untuk suatu usaha subversif.”

Karlina Supelli menguraikan di dalam refleksinya tentang strategi penggunaan kata susu dan pemahaman kata tersebut yang sengaja dibuat bermakna ganda.

“Saya ingat, ya, Gadis bilang kita harus berstrategi supaya *nggak* menarik perhatian, terutama perhatian intel dan sebagainya. Lalu kita buat dua istilah, ‘susu murni’ dan ‘susu politis’. Bu Toeti kasih nama itu” (Karlina Supelli 2025, Diskusi Bersama 9 Juni).

Karlina lebih lanjut menjelaskan bahwa istilah yang dilontarkan Toeti Heraty di dalam rapat di kantor *Jurnal Perempuan* mengenai “susu murni” dan “susu politis” mencerminkan bagaimana diskusi tentang kata “susu” tidak hanya terjadi secara taktis, tetapi juga dilakukan dengan penuh kesadaran politis dan semiotik. “Susu murni” menjadi representasi dari kepedulian ibu-ibu terhadap kebutuhan anak, sementara “susu politis” adalah pesan tersembunyi, terekspresikan dalam frasa kode, kode untuk menentang rezim Soeharto.

Diskusi-diskusi internal *Jurnal Perempuan* membahas studi kasus berkaitan dengan identitas “ibu” dipengaruhi oleh literatur pergerakan perempuan di dunia internasional. Salah satunya cerita tentang ibu-ibu Plaza de Mayo di Argentina disampaikan oleh Nur Iman Subono, yang pada saat itu juga adalah staf redaksi *Jurnal Perempuan* dan pengajar di jurusan Ilmu Politik, UI. Model aksi damai berbasis identitas keibuan itu menjadi inspirasi untuk membangun narasi lokal yang kuat. Di dalam rapat dengan para aktivis perempuan, ide ini digulirkan dan dibahas secara serius. Myra Diarsi aktivis feminis dari Kalyanamitra bersama Gadis mengeksplorasi penggunaan kata “ibu.” Maka dipilihlah nama “Suara Ibu Peduli”, bukan “Suara Perempuan Peduli”, karena kata “ibu” dirasa lebih dapat diterima publik dan tidak terlalu mengundang pertentangan di masyarakat. Jadi, nama “Suara Ibu Peduli” dimaksudkan bukan sebagai nama organisasi tetapi nama aksi yang akan dipakai pada tanggal 23 Februari 1998.

Rapat-rapat yang dilakukan di kantor *Jurnal Perempuan* bersama berbagai kalangan aktivis perempuan sering kali dilakukan pada malam hari karena di pagi harinya kantor masih berkegiatan rutin meneliti dan menerbitkan *Jurnal Perempuan*. Rapat pertama yang tercatat berlangsung pada 13 Februari 1998 dihadiri sekitar 15 aktivis perempuan dari berbagai organisasi, seperti Solidaritas Perempuan, LBH APIK, WALHI, ELSAM, dan beberapa akademisi dari UI. Beberapa nama kunci dalam pertemuan ini selain staf *Jurnal Perempuan* adalah Julia Suryakusuma, Myra Diarsi,

Robin Bush (mahasiswa asing yang sedang membuat disertasi), Yuniyanti Chuzaifah, Tati Krisnawaty, Salma Safitri, dan sebagainya. Teman-teman redaksi *Jurnal Perempuan*, seperti Liza Hadiz dan Umi Lasmina turut ikut memfasilitasi rapat. Rapat-rapat strategis lanjutan dilakukan pada tanggal 16, 20, dan 22 Februari untuk merancang formasi lapangan, lokasi kumpul, kode aksi

(seperti membuka payung sebagai tanda mulai aksi), serta simulasi jika terjadi penangkapan. Rapat-rapat selanjutnya sempat dihadiri oleh nama-nama, seperti Dina (Walhi), Agung Putri (ELSAM), Riga Adiwongso (FE UI), Toeti Heraty (Salah satu pendiri YJP dan dosen Filsafat UI), Gayatri, Nursjahbani Katjasungkana, Ita F. Nadia, Kartini Sjahrir, dan lain-lain (Arivia 2007 & 2018).

Tabel 1.
Rapat Persiapan & Menjelang Aksi SIP 23 Februari 1998 di YJP

Tanggal	Kegiatan
Agt/Spt '97	Obrolan awal di rumah Gadis Arivia bersama Karlina Supelli dan Eunsook.
27 Nov '97	Diskusi awal ide aksi di internal YJP: Diskusi kasus Plaza de Mayo di Argentina bersama Nur Iman Subono.
13 Feb '98	Rapat pertama di kantor YJP, dihadiri ±15 aktivis perempuan dari berbagai organisasi.
16 Feb '98	Rapat strategi aksi, penggalangan dana, dan pembahasan penggunaan istilah "susu murni" dan "susu politik".
20 Feb '98	Rapat penjualan susu murah sebagai bentuk strategi "cover up" atau kamuflase.
21 Feb '98	Distribusi susu murah ke masyarakat, membangun legitimasi gerakan moral.
22 Feb '98	Rapat final dan simulasi aksi; sebagian aktivis mundur karena status "Siaga Satu" di Jakarta.
23 Feb '98	Demonstrasi SIP di Bundaran HI, 3 aktivis ditangkap.

Dari tabel di atas, terlihat jelas persiapan yang matang yang dilakukan para aktivis perempuan dalam mengorganisir demonstrasi SIP 23 Februari 1998. Para aktivis memikirkan juga untuk melakukan "cover up" penjualan susu murah di kantor YJP dua hari sebelum aksi. Gadis menceritakan kegigihan Himah Sholihah mencari susu murah ke pabrik-pabrik di Pulogadung.

"Tanggal 20 Februari saya meminta mba Ima untuk mencari susu untuk kita jual murah di kantor Jurnal Perempuan pada tanggal 21 Februari. Karena kalau kita ditangkap, kita bisa beralasan bahwa kegiatan kita bukan "politik" tetapi benar-benar kegiatan membantu masyarakat dengan menyediakan susu murah. Perlu saya sebutkan di sini peranan mba Ima dengan sopir saya, Pak Natsir, ke Pulogadung, mencari susu murah. Padahal mereka juga tidak tahu harus mencari susu murah ke mana tapi mereka sendiri yang memecahkan persoalan itu" (Gadis Arivia 2025, Diskusi Bersama 9 Juni).

Himah Sholihah berhasil memperoleh susu murah dari pabrik susu dengan harga negosiasi. Dana yang terkumpul terbatas sebesar Rp5.950.000,00. Dana awal diperoleh dari Toeti Heraty, Gadis Arivia, dan Andrea (Gadis Arivia 2007, 2018). Himah melobi pabrik susu dan menjelaskan kebutuhan susu murah ini dan menurutnya, pegawai-pegawai perempuan pabrik malah ikut menyumbang karena mereka juga ingin membantu. Pengelolaan penjualan susu murah ini

di kantor YJP sepenuhnya dipimpin oleh Himah dan ditangani oleh *supporting staff* YJP, seperti Ani, Nazar, Supri, Robin, dan lain-lain. Malam sebelum penjualan susu, Ibu Sri dari Kalyanamitra ikut memasukkan susu bubuk ke dalam kantong-kantong plastik. Meja redaksi *Jurnal Perempuan* tidak lagi penuh dengan kertas-kertas keredaksian melainkan penuh oleh susu bubuk.

Di hari Sabtu, 21 Februari 2025, tak diduga peminat susu murah pagi-pagi sudah mengantri panjang di kantor YJP. Siang harinya, antrian begitu panjang dan terjadi dorong-mendorong sehingga kaca kantor pecah. Suasana hiruk pikuk, ibu-ibu maupun bapak-bapak berebutan susu. Aksi penjualan susu murah tidak bertahan lama karena khawatir akan keamanan. YJP menyewa kantor di Megaria tersebut dari ibu Toeti Heraty dan sangat khawatir terjadi perusakan.

Malam harinya, Karlina dan Gadis merasa perlu melaporkan apa yang terjadi dengan aksi susu murah di kantor YJP. Para aktivis perempuan berkumpul dan berdiskusi. Selain melaporkan apa yang terjadi di kantor pagi harinya, kami juga ingin membahas rencana detail demonstrasi. Malam itu ditetapkan lokasi demonstrasi yaitu Bundaran HI sebab bundaran HI adalah tempat perkantoran, pusat kota, dan mudah untuk menjalankan demonstrasi dengan berpakaian "ala" kantor. Rapat untuk merencanakan secara rinci

demonstrasi tidak terjadi karena mayoritas aktivis perempuan merasa kondisi berdemonstrasi tidak kondusif. Suasana di Jakarta sudah semakin tegang dan akhirnya beberapa teman-teman mengundurkan diri untuk ikut berdemonstrasi karena status “Siaga Satu” yang ditetapkan di Jakarta.

Karlina dan Gadis dalam diskusi refleksinya mengakui bahwa alasan sebagian teman-teman aktivis mengundurkan diri bisa diterima. Pada dasarnya, kami tidak ingin adanya korban dan merasa keselamatan peserta demonstrasi adalah hal yang utama. Namun, kami juga merefleksikan keputusan kami untuk tetap teguh melaksanakan niat berdemonstrasi. Karlina mengungkapkan:

“Meskipun yang bersedia ikut menyusut jumlahnya dan banyak yang mengundurkan diri sehingga hanya 12–14 orang yang akan berdemo, tetapi kita akhirnya sepakat untuk turun ke jalan” (Karlina Supelli 2025, Diskusi Bersama 9 Juni).

Gadis juga merasa “tugas” melakukan demonstrasi ini perlu dilakukan meskipun khawatir sebab Gadis memiliki dua anak kecil berumur 2 tahun dan bayi 8 bulan. Rapat di hari Minggu, 22 Februari 1998, merencanakan persiapan terakhir. Julia Suryakusuma, Gayatri, dan Myra Diarsi ikut mempersiapkan segala keperluan untuk berdemonstrasi keesokan harinya.

Tabel 2.
Keperluan yang Disiapkan

Spanduk dan Poster	Menggunakan bahasa simbolik dan makna ganda, seperti: • “Turunkan harga susu” • “Kami ibu-ibu peduli masa depan anak bangsa” • “Susu untuk kehidupan, bukan kekuasaan” Makna tersembunyinya adalah “Turunkan Su-su-Harto”.
Bunga-bunga	Dibawa oleh demonstran untuk dibagikan kepada pengguna jalan dan aparat. Simbol empati, kedamaian, dan “keibuan”.
Tas dan Pakaian	Berpakaian seperti pekerja kantor biasa. Menyamar sebagai pekerja kantoran agar dapat menyeberang ke Bundaran HI tanpa dicurigai polisi (pos polisi persis di area demonstrasi).
Payung	Digunakan sebagai kode isyarat memulai aksi (saat payung dibuka, peserta mulai bergerak masuk ke Bundaran HI).
Daftar Kontak	Siaga menghadapi kemungkinan penangkapan. Kontak pengacara dan wartawan telah disiapkan, termasuk koordinasi dengan LBH dan wartawan nasional dan internasional.

Pelaksanaan Aksi, Penangkapan, dan Reaksi Keluarga

Hari Senin yang dinanti dengan harap dan cemas tiba. Bundaran Hotel Indonesia seperti biasa dipenuhi orang kantoran dan warga yang lalu lalang. Bundaran HI hari itu menjadi panggung simbolik aktivis feminis. Sekitar 12 hingga 14 aktivis perempuan hadir siap melaksanakan niatnya untuk berdemonstrasi. Suasana “Siaga Satu” terasa dengan banyaknya polisi yang sedang berjaga. Seperti yang telah disepakati, para aktivis mengenakan pakaian kantor, membawa tas berisi poster dan bunga, berlagak menyamar sebagai pekerja kantoran demi bisa melewati aparat dan menyusup ke Bundaran HI. *Teman-teman aktivis yang*

hadir selain segenap staf Jurnal Perempuan adalah Julia Suryakusuma, Yuniyanti Chuzaifah, Myra Diarsi, Gayatri, Nori Andriyani, Tati Krisnawaty, Tinneke Arif, Wilasih, dan suster-suster. Karlina dalam diskusi refleksi bersama menjelaskan tentang kehadiran teman-teman suster:

“Pada hari H-nya *kan* kita kaget karena tiba-tiba Suster Francisco datang dengan 2 atau 3 Suster, *gitu*..karena saya menghubungi Romo Ismartono dan Romo Ismartono lalu menelepon Suster Francisco, bilang bahwa Karlina dan Gadis dan temen-temennya akan melakukan protes... Suster Francisco, sangat bangga pada aksi SIP 23 Februari itu dan ke mana-mana dia bilang saya tidak berhenti belajar dari aksi Suara ibu Peduli. Ikut turun ke jalan. Bagi saya, sangat berarti karena ketika banyak yang mundur tidak jadi demo, ada suster-suster bilang mau ikut” (Karlina Supelli 2025, Diskusi Bersama 9 Juni).

Aksi dimulai dengan kode yang telah dibicarakan; ketika payung dibuka, mereka menyeberang dan membentuk lingkaran. Karlina dengan pakaian kantor, blazer warna oranye, menjadi korlap dan membuka payung (sebagai kode) agar semua peserta demonstrasi secara serentak menyeberang ke dalam Bundaran HI. Di dalam bundaran, mereka membacakan puisi, doa, dan menyanyikan lagu-lagu perdamaian. Polisi mulai mendekat, namun para aktivis tetap tenang dan bahkan mengajak aparat untuk berdoa bersama. Dalam suasana mencekam di bawah ancaman kekerasan aparat, kami memilih untuk menghadirkan keberanian dalam bentuk doa, empati, dan simbol damai dengan memegang bunga, bukan slogan agresif. Hal ini memperlihatkan bahwa politik feminis tidak selalu berteriak, tetapi bisa hadir lewat gestur kecil yang sarat makna simbolik dan resistensi. Taktik ini berhasil.

Aksi berlangsung tidak lama hanya sekitar 30 menit. Kami ditangkap dan digiring ke truk polisi. Bagi Wilasih, yang tidak terlibat dalam rapat-rapat persiapan, aksi ini adalah murni tindakan spontan berdasarkan panggilan nuraninya karena sudah diinformasikan oleh Stanley yang ketika itu adalah bagian dari perencanaan aksi SIP untuk mengoordinasi wartawan. Wilasih awalnya khawatir dua perempuan yang bersamanya di truk mengira ia adalah penyusup. Namun, yang ia temukan adalah rasa saling menguatkan dan kekaguman pada keteguhan moral rekan-rekannya. Gadis dan Karlina sempat kaget ada sosok Wilasih ketika diangkut ke dalam truk.

"Saya duduk di dalam truk itu dengan dua perempuan yang bahkan saya tidak kenal... Tapi saya merasa saya bisa menguatkan mereka karena saya sudah terbiasa berhadapan dengan aparat" (Wilasih Nophiana Kunta Adjie 2025, Testimoni Tertulis 24 Juni).

Wilasih bukan satu-satunya yang memastikan Karlina dan Gadis mendapatkan dukungan sepenuhnya mengingat mereka belum berpengalaman berurusan dengan aparat. Sosok aktivis lain yang muncul adalah Soendjati yang sigap menunggu kedatangan kami di Polda. Soendjati ketika itu aktivis PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia) dan Karlina dan Gadis pun tidak mengenalnya. Ketika kami digiring masuk ke kantor Polda, tangan Gadis langsung diapit Soendjati dan ia membisikkan bahwa ia ada karena diminta teman-teman aktivis membantu menjaga kami. Kami mensyukuri kesigapan teman-teman aktivis HAM, yang di luar sepengetahuan kami, telah menyusun siasat dan rencana matang melindungi kami. Penangkapan

kami menjadi sorotan media. Wartawan sudah diberi informasi sebelumnya oleh Stanley Adi Prasetyo. Mereka cepat merespons dan menyebarkan berita. Julia Suryakusuma berperan sebagai kontak media dan menyusun siaran pers berbahasa Inggris dan Indonesia. Julia pun menangani semua pertanyaan dan wawancara yang datang bertubi-tubi selama Gadis dan Karlina ditahan. Aksi feminis yang semula diperkirakan kecil justru menjadi peristiwa nasional.

Kami juga merenungkan reaksi keluarga dan bagaimana keluarga menjadi penting dalam pembahasan tulisan ini. Reaksi keluarga terhadap keterlibatan perempuan dalam demonstrasi feminis seperti aksi SIP perlu diungkapkan. Di dalam studi feminisme, hal-hal seperti benturan, negosiasi, reproduksi makna kekuasaan, serta gender dalam ruang domestik, sering kali dianggap apolitis. Namun, justru hal-hal tersebut menjadi arena pembentukan kesadaran dan resistensi perempuan. Misalnya, dalam studi Patricia Collins (2000) tentang feminis kulit hitam, menjelaskan bahwa keluarga bukan sekedar latar belakang pasif, melainkan medan konflik ideologis antara norma gender tradisional dan kesadaran politis yang sedang tumbuh. Ia menyebutkan bahwa "Individual biographies are situated within family, community, and institutional settings. This relational context shapes Black women's knowledge and actions" (Collins 2000, hlm. 273).

Dalam konteks SIP dan identitas diri sebagai feminis, kami melihat bagaimana kami harus menegosiasikan identitas kami sebagai anak, ibu, dan istri, sambil tetap menjalankan aksi yang kami anggap sebagai bentuk tanggung jawab etis dan politis. Karlina misalnya harus tetap menjalankan tugasnya mengantarkan anaknya ke sekolah pagi hari sebelum ikut demonstrasi. Karlina menceritakan bagaimana anaknya, Arma, yang ketika itu duduk di bangku SMP bereaksi.

"Pagi tanggal 23, tiba-tiba saya mendapatkan kamar saya dikunci dari luar oleh Arma. Anak-anak tahu apa yang mau dilakukan ibunya berbahaya, tapi persisnya mereka tidak tahu. Tapi mereka tahu ini berisiko, bisa berbahaya, karena mereka lihat sikap ayahnya yang langsung seperti *nggak* mau bicara lagi soal itu. Jadi Arma takut sekali terjadi apa-apa dengan ibunya. Pagi saya bangun kok kamar saya dikunci dari luar, Ibu saya akhirnya yang berhasil membujuk dia, minta kuncinya" (Karlina Supelli 2025, Diskusi Bersama 9 Juni).

Baik Karlina maupun Gadis harus memastikan bahwa urusan rumah tangga tetap terjaga dan keduanya meminta ibu mereka untuk menjaga anak-anak mereka.

Gadis bahkan tidak memberikan alasan sebenarnya kepada ibunya, hanya menginformasikan bahwa ada rapat jurusan Filsafat UI di Puncak dan membutuhkan ibunya untuk menjaga anak-anaknya yang masih kecil-kecil karena suaminya sedang bertugas di luar kota. Baik Gadis maupun Karlina merasa sangat beruntung bahwa ibu mereka memahami kegiatan mereka dan memberikan dorongan serta semangat. Satu hal yang disesali Gadis adalah ketika ia diperbolehkan pulang keesokan harinya dari Polda, anaknya yang berumur 8 bulan tidak mau lagi menyusui. Susu perasan yang disimpan di kulkas telah habis dan terpaksa ibunya memberi susu formula kepada anaknya karena Gadis tidak pulang. Yang menarik adalah tuturan Wilasih yang situasinya berbeda dengan Gadis dan Karlina. Ia menghadapi beban sosial berlipat dan menegosiasikan berbagai identitas.

“Sebagai perempuan yang dilahirkan dari keluarga etnis Cina, saya sering sekali mengalami hal yang sangat menyinggung secara kemanusiaan. Namun, kesadaran sebagai bangsa akan mengecilkan diskriminasi seperti itu. Karena pemihakan terhadap yang paling tertindas adalah pilihan saya. Dan Indonesia adalah tanah air saya” (Wilasih Nophiana Kunta Adjie 2025, Testimoni Tertulis, 24 Juni).

Bagi kami, ungkapan Wilasih menarik. Bukan saja Wilasih merasa perlu menggarisbawahi Indonesia adalah tanah airnya, tetapi juga pertimbangan etnisitasnya masuk dalam relung kesadarannya dan menjadi bagian dari keputusannya untuk berdemonstrasi. Interseksi antara etnisitas, sikap politis, dan struktur kekuasaan keluarga menggambarkan apa yang Collins (2000) uraikan pentingnya interseksionalitas dan epistemologi pengalaman dalam memahami bagaimana perempuan membentuk kesadaran politik dari tempat-tempat yang dianggap wilayah pribadi. Lebih jauh Wilasih dalam refleksinya mengungkapkan:

“Teman teman mendukung saya berdemonstrasi tetapi keluarga saya tidak. Mereka sangat ketakutan setelah tahu bahwa saya ditangkap. Bahkan ketakutan ini semakin meningkat setelah masa persidangan karena seolah-olah rumah saya diintai. Intel akan datang ke rumah saya ketika saya keluar rumah, mendatangi Ibu saya, bilang bahwa betapa bahaya kegiatan saya, tindakan saya adalah makar terhadap negara. Mereka masuk dan memeriksa buku-buku saya, mengambil beberapa buku saya. Itulah menjadi keputusan saya untuk meninggalkan Jakarta supaya ibu saya tidak lagi diteror ketakutan” (Wilasih Nophiana Kunta Adjie 2025, Testimoni Tertulis, 24 Juni).

Persidangan dan Pledoi

Pada tanggal 4 Maret 1998, persidangan dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kami didakwa melanggar Pasal 510 KUHP mengganggu ketertiban umum di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Suasana sidang dipenuhi dukungan publik, ratusan pengunjung hadir dan menyambut ketiganya dengan nyanyian, seperti *Kasih Ibu*, *Ibu Pertiwi*, serta memberikan bunga kepada kami. Para tokoh yang hadir, antara lain Prof. Dr. Emil Salim dan Prof. Dr. Saparinah Sadli (Kompas, 4 Maret 1998). Kami didampingi oleh Apong Herlina dan Nursjahbani Katjasungkana dari LBH APIK yang menjadi pengacara kami. Karlina memaparkan suasana di Pengadilan Negeri:

“Di persidangan yang menarik bagi saya waktu itu adalah Ibu-ibu berjilbab datang bersama suster-suster mendukung kita, sama-sama pegangan tangan, bawa bunga untuk kita. Ternyata kita didukung oleh begitu banyak orang. Lalu persidangan itu sebetulnya kasian, ya bu Hakim karena dia merasa hanya menjalankan tugas. Mungkin juga saya *nggak* tahu seberapa tekanan yang dia terima tapi *kan* dia mesti menghukum kita, tapi saya *ingat* dia bilang bahwa dia paham persoalannya, *ngerti* alasannya tapi tetap kita melanggar hukum” (Karlina Supelli 2025, Diskusi Bersama 9 Juni).

Dalam persidangan, kami dan penasihat hukum menyampaikan “Pernyataan Pendahuluan” untuk menanggapi dakwaan. Kami menyatakan bahwa aksi tersebut bukanlah pelanggaran hukum, melainkan bentuk dialog damai dan respons terhadap kondisi sosial ekonomi. Kami sadar bahwa di dalam tradisi negara otoriter, ruang pengadilan sering kali digunakan untuk membungkam suara-suara kritis dan suasana dibuat mencekam. Namun, di dalam persidangan SIP, pengadilan justru kami balik fungsinya menjadi panggung artikulasi moral dan politis perempuan. Kami membuat pledoi yang tidak defensif, tetapi afirmatif, menggunakan bahasa yang menggabungkan emosi dan logika sipil. Karlina berbicara sebagai seorang ibu, pendidik, dan pemikir:

“Saya tidak ingin anak-anak saya dan anak-anak bangsa ini, tumbuh dalam kebisuan dan ketakutan. Saya ingin mereka tahu bahwa perempuan juga memiliki suara dan suara itu sah untuk didengar oleh negara” (Karlina 1998, dalam Subono, YJP 1999).

Gadis menegaskan bahwa demonstrasi adalah bagian dari hak asasi manusia. Dalam pernyataannya, Gadis menggeser kerangka hukum dari aspek

kriminalitas ke wilayah konstitusionalitas dan hak warga negara. Ia menyodorkan posisi perempuan sebagai subyek politis yang sah dan bukan semata sebagai ibu yang hanya peduli kebutuhan anak, tetapi sebagai warga negara yang peduli arah bangsa.

“Saya datang ke Bundaran Hotel Indonesia bukan untuk merusak ketertiban umum, tetapi untuk menyuarakan keprihatinan dan penderitaan rakyat kecil...Demonstrasi itu adalah hak warga negara” (Gadis Arivia 1998, dalam Subono, YJP 1999).

Pledoi Wilasih menarik karena ia menyusunnya dengan kesadaran bahwa ia harus memainkan peran sebagai demonstran yang spontan sebagai “ibu-ibu” sesuai dengan apa yang ia utarakan di Polda ketika diinterogasi. Pledoinya harus meyakinkan dan ia berhasil dalam menggabungkan kedua aspek emosi “keibuan” dan logika sipil.

“Saya marah, karena negara takut ketika seorang ibu berdiri dan bersuara. Saya tidak membawa senjata, saya hanya membawa hati yang peduli” (Wilasih Nophiana 1998, dalam Subono, YJP 1999).

Kami dinyatakan bersalah dan berkehendak naik banding. Sementara itu, mahasiswa mulai bergerak sejak 19 Mei hingga 23 Mei 1998. Kantor *Jurnal Perempuan* menjadi posko nasi bungkus dan tempat mahasiswa singgah. Sebanyak 70.576 nasi bungkus disalurkan, 1947 kotak Aqua, 2.811 kotak kudapan, serta uang sebanyak Rp120.541.865,00 (laporan keuangan YJP, 1998—1999) disumbangkan untuk keperluan demonstrasi mahasiswa. Sumbangan juga digunakan untuk Newsletter “Bergerak”, T-Shirt “Reformasi Total” yang dibagikan kepada mahasiswa dan masyarakat umum (Gadis Arivia 2007, 2018).

Soeharto berhenti pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh B. J. Habibie yang menjabat sebagai wakil presiden. Ia menggantikan Soeharto dan menjabat selama satu tahun. Karlina menyatakan bahwa setelah Habibie menjabat sebagai Presiden ada upaya untuk menghapus catatan hukum kami dan akhirnya Habibie melakukan abolisi hukum kami termasuk Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, tokoh buruh.

Penutup

Demonstrasi Suara Ibu Peduli (SIP) pada 23 Februari 1998 merupakan sebuah momen penting dalam sejarah gerakan perempuan dan sejarah politik Indonesia. Aksi SIP adalah tonggak penting dalam sejarah reformasi dan demokrasi Indonesia. Aksi ini bukan semata reaksi

terhadap krisis ekonomi atau keprihatinan kenaikan harga susu, melainkan bentuk intervensi politik yang cermat dan penuh kesadaran strategis. Identitas “ibu” dan simbol “susu” dimanipulasi untuk menarik simpati publik sekaligus digunakan sebagai alat untuk menyampaikan kritik pada rezim Soeharto yang dinilai represif. Para aktivis perempuan menghadirkan cara pandang baru, yang berakar pada empati, namun sarat dengan makna politis. Representasi keibuan dalam konteks SIP bukanlah bentuk konservatisme, melainkan politik praksis feminis, sebab mengubah kesadaran, relasi kuasa, dan struktur sosial melalui pengalaman perempuan. Demonstrasi SIP menunjukkan politik feminis yang strategis.

Melalui pendekatan autoetnografi kolaboratif, refleksi ini memperlihatkan bahwa relasi personal bukanlah wilayah yang terpisah dari politik, tetapi justru menjadi sumber keberanian dan kesadaran. Sidang, pledoi, hingga percakapan dalam ruang keluarga adalah bagian dari lanskap politik feminis yang kerap diabaikan. Para aktivis SIP memperlihatkan bahwa perjuangan tidak hanya terjadi di panggung publik, tetapi juga dalam tindakan sehari-hari yang sarat makna, termasuk memilih kata, pakaian, atau bunga sebagai alat perjuangan.

Apa yang dilakukan oleh para aktivis perempuan dalam aksi SIP membuktikan politik feminis sungguh efektif. Melalui tulisan ini, kita tidak hanya merawat ingatan tentang keberanian aktivis perempuan di masa Orde Baru, tetapi juga menegaskan bahwa feminisme di Indonesia tumbuh dari pengalaman yang konkret, cerdas, dan transformatif.

Daftar Pustaka

- Arivia, G. & Supelli, K. 2025, 9 Juni. *Transkrip Diskusi Bersama Strategi Berlapis Suara Ibu Peduli-Reformasi* [Unpublished interview transcript].
- Arivia, G. 2007. Politik Representasi Suara Ibu Peduli. Makalah dipresentasikan di Plaza Gedung Nusantara II DPR RI, 2 Mei 2007.
- Arivia, G. 2018. Blog Jurnal Perempuan, Politik Representasi Suara Ibu Peduli <https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/politik-representasi-suara-ibu-peduli>.
- Blackburn, S. 2004. *Women and the State in Modern Indonesia*. Cambridge University Press: Cambridge.
- Chang, H. 2008. *Autoethnography as a Method*. Left Coast Press: Walnut Creek, CA.
- Cooper, R. & Lilyea, B. V. 2022. I'm Interested in Autoethnography, but How Do I Do It? The Qualitative Report, 27(1), hlm. 197–208. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5288>.

Collins, P. H. 2000. *Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment* (2nd ed.). Routledge: New York.

Ellis, C. & Bochner, A. P. 2000. *Autoethnography, Personal Narrative, Reflexivity: Researcher as Subject*. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (eds.), *Handbook of Qualitative Research* (2nd ed., pp. 733–768). Sage Publications: Thousand Oaks, CA.

Hutcheon, L. 1989. *The Politics of Postmodernism*. Routledge: London.

Lassiter, L. E. 2005. *The Chicago Guide to Collaborative Ethnography*. University of Chicago Press: Chicago, IL.

Nophiana, W. 2025. Testimoni Tertulis (Unpublished).

Subono, N. I. (ed.). 1999. *Catatan Perjalanan Suara Ibu Peduli*. YJP Press: Jakarta.

Trinh, T. M. 1991. *When the Moon Waxes Red: Representation, Gender and Cultural Politics*. Routledge: New Delhi.

Catatan Kaki

- 1 Istilah *Cina* dalam tulisan ini digunakan sebagaimana tertera dalam sumber dan merujuk pada identitas etnis Tionghoa di Indonesia.